

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN RANTAI PASOK BERAS MEDIUM DI PROVINSI LAMPUNG

*(Effectivity of policy of highest retail pieces (HET) and supply chains of medium rice in Lampung Province)*

Nadya Putri, Raden Hanung Ismono, Ktut Murniati

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung 35141, e-mail: hanung.ismono@fp.unila.ac.id

### ABSTRACT

*Indonesia is a country that consumes and produces rice, so rice is a primary need in Indonesia. The government stipulates the highest retail price (HET) of rice policy to maintain the stability of rice price. The purposes of this study are to find out the effectiveness of rice HET policy in Lampung Province, to analyze the impacts of the policy stipulation, and to find out the difference between medium rice supply chains before and after the HET Policy. This research uses quantitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques used were interviews using questionnaires and also observation. The results of this study were the policy of medium rice HET has not been effectively implemented Lampung Province with price difference of Rp1.663,00. This caused no impact on the farmers, distributors, retail traders, and consumers. In the previous study, the medium rice supply chain flow in Lampung Province was in four marketing channels while in the current study was in six marketing channels.*

*Keywords: effectiviness, HET, rice, supply*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memproduksi beras karena mayoritas masyarakatnya mengkonsumsi beras sebagai pangan pokok. Beras di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yaitu beras kelas premium, beras kelas medium, dan beras kelas khusus. Beras medium yaitu beras yang memiliki butir patah maksimal 25%. Beras premium yaitu beras yang memiliki butir patah maksimal 15%. Beras khusus merupakan beras yang memiliki bentuk atau warna yang berbeda dari beras pada umumnya. Beras medium merupakan beras yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beras premium dan beras khusus.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2017 menyatakan bahwa konsumsi per kapita per minggu beras di Indonesia yaitu sebesar 1,62 Kg hingga 1,73 Kg. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi setiap hari (Aldhariana, Lestari, dan Ismono, 2016). Menurut Bulog (2015), agar kebutuhan akan beras dapat terpenuhi, diperlukan pemantauan dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok. Dengan melakukan pengawasan terhadap harga beras maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pembelian beras oleh konsumen.

Dalam rangka mewujudkan ketetapan harga beras tersebut pemerintah merumuskan kebijakan yang membatasi harga jual beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2017 dan mulai diberlakukan pada setiap penjual beras eceran pada bulan September 2017. Tujuan kebijakan HET tersebut adalah untuk menjaga stabilitas harga beras, menetapkan kepastian harga beras, dan keterjangkauan pembelian beras oleh konsumen.

Kebijakan HET beras diharapkan memberikan dampak yang berbeda bagi setiap pelaku usaha. Perubahan harga yang ada akan memberikan dampak ekonomi bagi pihak petani hingga konsumen. Untuk dapat melihat dampak tersebut diperlukan pengkajian aspek ekonomi pada pelaku usaha beras maupun gabah. Rantai pasok beras akan berbeda antara sebelum dan setelah Kebijakan HET beras. Hal tersebut terjadi dikarenakan rantai pasok merupakan sistem yang menghubungkan pemasok, distributor pedagang eceran, dan konsumen akhir. Anatan (2000) mendefinisikan manajemen rantai pasok sebagai integrasi proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok yang memberikan produk, jasa, informasi. Berdasarkan uraian fenomena dan masalah yang telah dijabarkan tersebut, muncul

suatu pertanyaan yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana aliran produk, aliran finansial, dan aliran informasi rantai pasok beras setelah ditetapkannya kebijakan HET beras. Apakah aliran tersebut berbeda dengan sebelum adanya Kebijakan HET beras.

Untuk melihat efektivitas Kebijakan HET beras medium, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, dan kinerja rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung maka penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektivitas Kebijakan HET beras di Provinsi Lampung, menganalisis dampak ekonomi kebijakan HET beras dari sudut pandang petani, penyalur, pedagang eceran serta konsumen, dan mengetahui perbedaan rantai pasok beras medium sebelum dan setelah Kebijakan HET.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilaksanakan di daerah produsen beras (surplus beras) yaitu Provinsi Lampung. Seperti yang dinyatakan Fitriani, Ismono, dan Rosanti (2011), kondisi produksi beras di Propinsi Lampung rata-rata per tahun lebih besar daripada kebutuhan konsumsi (surplus). Kecamatan Trimurjo sebagai daerah produsen dan Kecamatan Punggur sebagai daerah penyalur beras dipilih sebagai lokasi penelitian dalam meneliti rantai pasok beras medium dan dampak dari kebijakan HET beras.

Efektivitas dari Kebijakan HET beras medium eceran dapat dilihat pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Menurut (Destiani, Ismono, dan Adawiyah, 2013) secara umum peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah konsumsi berbagai produk pangan. Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu merupakan yang termasuk ke dalam kepadatan penduduk lima tertinggi di Provinsi Lampung. Oleh karena itu daerah tersebut dapat dijadikan lokasi yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian dalam melihat efektivitas kebijakan HET beras medium.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara terstruktur. Penelitian ini dilakukan di Trimurjo, Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Punggur. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*). Pengambilan data dilakukan pada Februari hingga Maret 2018. Jumlah responden terdiri dari 51 petani, 32 penyalur, 53 pedagang eceran, serta 30

konsumen beras medium. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

#### 1. Analisis data tujuan 1

Analisis data yang digunakan dalam menjawab tujuan pertama yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus efektivitas yang dimodifikasi dari Schemerhon John R (Sucahyowati 2017) yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{harga beras medium di pasar}}{\text{Harga Eceran Tertinggi (HET)}} \dots\dots\dots(1)$$

Apabila nilai efektivitas HET kurang dari atau sama dengan 1 maka Kebijakan HET beras dinyatakan efektif. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan efektivitas HET lebih dari 1 maka Kebijakan HET beras dinyatakan tidak efektif.

#### 2. Analisis data tujuan 2

Tujuan kedua menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dampak diukur dengan membandingkan data harga beras, pendapatan penyalur, harga jual gabah, dan pembelian beras sebelum dan sesudah Kebijakan HET beras. Data dianalisis dengan uji beda *t-test* menggunakan SPSS. Menurut Priyatno (2010), kriteria pengambilan keputusan apabila Sig.(*2-tailed*) lebih kecil dari Alpha (0,1) maka Ho ditolak, dan apabila Sig.(*2-tailed*) lebih besar dari Alpha (0,1) maka Ho diterima. Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui dampak Kebijakan HET beras:

- a. Petani
  - Ho = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga jual gabah sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET
  - Hi = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga jual gabah sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET
- b. Penyalur
  - Ho = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan penyalur sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET
  - Hi = Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan penyalur sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET
- c. Pedagang Eceran
  - Ho = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga jual beras eceran sebelum dan setelah Kebijakan HET
  - Hi = Terdapat perbedaan yang signifikan antara harga jual beras eceran sebelum dan setelah Kebijakan HET

d. Konsumen

Ho= Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelian beras sebelum dan setelah Kebijakan HET

Hi = Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelian beras sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET

Persentase pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta apabila terjadi perubahan harga diukur menggunakan rumus elastisitas harga permintaan menurut Agung, Wijiharjono, dan Setyowati (2013):

$$Ed = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{(Q_2 - Q_1)}{Q_1} : \frac{(P_2 - P_1)}{P_1} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Ed : Elastisitas permintaan terhadap harga
- ΔQ : Perubahan jumlah barang yang diminta
- ΔP : Perubahan harga
- Q : Jumlah barang yang diminta
- P : Harga

3. Analisis data tujuan 3

Analisis data tujuan ketiga menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Rantai pasok beras medium yaitu sistem yang menghubungkan beras dari petani hingga konsumen. Analisis tersebut untuk mengetahui aliran beras medium setelah Kebijakan HET beras. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

**Efektivitas Kebijakan HET beras medium**

Kebijakan HET beras merupakan kebijakan yang membatasi harga jual beras. Harapan pemerintah yaitu agar harga beras turun sehingga berada di bawah HET tersebut. Di Provinsi Lampung HET beras yang telah ditetapkan yaitu Rp9.450,00. Harga tersebut dihitung menggunakan rumus efektivitas yaitu dengan membandingkan harga beras medium hasil survei dengan HET beras medium yang telah ditetapkan. Kebijakan HET beras medium di Provinsi Lampung sejak ditetapkan pada bulan September 2017 hingga bulan Februari 2018 dinyatakan tidak efektif karena berdasarkan hasil survei rata-rata nilai efektivitas Kebijakan HET lebih dari satu. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan di beberapa lokasi harga beras lebih tinggi daripada HET beras dengan harga rata-rata sebesar Rp11.113,00/kg.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan HET beras di Provinsi Lampung tidak seperti yang diharapkan. Penyebab kurang efektifnya kebijakan HET beras medium yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Kebijakan HET beras kepada para pedagang eceran beras. Hal tersebut menyebabkan pedagang tidak mengetahui batasan harga jual tertinggi beras sehingga pedagang eceran beras medium tidak mempertimbangkan kebijakan dalam menjual beras. Harga beras beberapa pedagang yang tinggi yaitu sebesar Rp11.500,00/kg hingga Rp12.000,00/kg juga menjadi alasan dari tingginya harga beras medium yang dijual pedagang eceran beras medium. Bila hal ini terus berjalan tanpa ada upaya untuk menanggulangnya, Kebijakan HET berastidak dapat efektif dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hasil analisis dari efektivitas kebijakan HET beras dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis efektivitas Kebijakan HET beras September 2017 - Februari 2018 di Provinsi Lampung

No	Bulan	Rata-Rata HargaBeras Medium (Rp/Kg)	HET beras (Rp/Kg)	Efektivitas	Selisih (Rp/Kg)	Persentase (%)	Keterangan
1	September 2017	10.329	9.450	1,09	879	9,30	TidakEfektif
2	Oktober 2017	10.665	9.450	1,13	1.215	12,86	TidakEfektif
3	November 2017	11.147	9.450	1,18	1.697	17,96	TidakEfektif
4	Desember 2017	11.494	9.450	1,23	2.044	21,63	TidakEfektif
5	Januari 2018	11.601	9.450	1,23	2.151	22,76	TidakEfektif
6	Feb 2018	11.439	9.450	1,21	1.989	21,05	TidakEfektif
	Rata-Rata	11.113	9.450	1,18	1.663		TidakEfektif

Sumber: Data primer, 2018

**Dampak Kebijakan HET Beras**

1. Dampak terhadap petani

Kebijakan HET beras yang belum efektif dilaksanakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap petani. Untuk melihat perbedaan harga jual gabah antara sebelum dan setelah Kebijakan HET dapat dilihat dari harga jual gabah sebelum dan setelah Kebijakan HET. Harga jual gabah sebelum adanya Kebijakan HET beras lebih rendah daripada harga jual gabah setelah Kebijakan HET beras. Hasil dari uji *paired sample t-test* menggunakan SPSS didapatkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai sig.(2-tailed) tersebut lebih kecil daripada Alpha (0,1) sehingga Ho ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara harga jual gabah sebelum adanya Kebijakan HET dan setelah adanya Kebijakan HET.

Harga jual gabah tersebut mengalami peningkatan antara sebelum dan setelah Kebijakan HET beras sebesar Rp305,00/kg. Akan tetapi peningkatan harga tersebut bukan disebabkan oleh Kebijakan HET, melainkan karena ketersediaan gabah yang berkurang. Apabila dilihat dari sudut pandang petani, peningkatan harga gabah yang terjadi dapat sedikit meningkatkan pendapatan petani. Petani tidak menjual gabah dengan mempertimbangkan Kebijakan HET melainkan sesuai harga yang berlaku dan yang ditawarkan oleh agen atau tengkulak serta tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Apabila dilihat dari sisi petani, harga gabah yang dijual petani berada di atas HPP (Rp4.200,00/kg). Rata-rata harga jual gabah di tingkat petani di Provinsi Lampung sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata harga jual gabah di tingkat petani di Provinsi Lampung

No	Sebelum HET		Setelah HET	
	Bulan	Harga (Rp/Kg)	Bulan	Harga (Rp/Kg)
1	Mei 2017	4.720	September 2017	4.720
2	Juni 2017	4.680	Oktober 2017	4.880
3	Juli 2017	4.660	November 2017	4.980
4	Agustus 2017	4.620	Desember 2017	5.280
	Rata-rata	4.670	Rata-rata	4.965

Sumber: Data primer, 2018.

2. Dampak terhadap penyalur

Kebijakan HET beras medium belum efektif dilaksanakan menyebabkan Kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap penyalur. Untuk melihat perbedaan pendapatan penyalur antara sebelum dan setelah Kebijakan HET beras dapat dilihat dari pendapatan penyalur sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET beras. Hasil dari uji *paired sample t-test* menggunakan aplikasi SPSS dan didapatkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,007. Nilai sig.(2-tailed) lebih kecil daripada alpha (0,1) sehingga Ho ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan penyalur sebelum adanya Kebijakan HET dan setelah adanya Kebijakan HET.

Perbedaan yang terjadi yaitu terdapat pada penurunan rata-rata pendapatan sebesar Rp226.554,80. Akan tetapi perbedaan pendapatan tersebut bukan disebabkan oleh Kebijakan HET, melainkan karena harga gabah yang naik turun. Penyalur beras menjual beras mengikuti alur pasar dan tidak mengikuti kebijakan apapun. Kebijakan HET beras yang belum efektif dilaksanakan menyebabkan Kebijakan HET beras tersebut tidak berdampak terhadap penyalur. Dari sisi agen dan pedagang besar, Kebijakan HET beras berdampak bagi aspek ekonomi mereka yaitu terjadi penurunan pendapatan. Pada sisi bulog, dampak Kebijakan HET beras hampir tidak ada dikarenakan bulog yang berperan sebagai operator dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Rata-rata pendapatan penyalur di Provinsi Lampung pada Juni 2017 sampai dengan November 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata pendapatan penyalur beras di Provinsi Lampung pada kurun waktu Juli hingga November 2017

No	Sebelum HET		Setelah HET	
	Bulan	Pendapatan (Rp)	Bulan	Pendapatan (Rp)
1	Juni 2017	14.974.200,00	Sept2 017	14.617.952,38
2	Juli20 17	14.032.761,90	Okt 2017	13.969.642,86
3	Agst 2017	14.599.952,38	Nov 2017	14.339.654,76
	Rata-Rata	14.535.638,10	Rata-rata	14.309.083,33

Sumber: Data primer, 2018

3. Dampak terhadap pedagang eceran

Kebijakan HET beras yang belum efektif dilaksanakan menyebabkan Kebijakan HET tersebut tidak berdampak terhadap pedagang eceran. Untuk melihat perbedaan harga jual beras antara sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET beras dapat dilihat harga jual beras sebelum dan harga jual beras setelah adanya Kebijakan HET beras. Hasil dari analisis uji *independent sample t-test* didapatkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai sig.(2-tailed) lebih kecil dari pada Alpha (0,1) sehingga Ho ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara harga jual beras medium antara sebelum adanya Kebijakan HET beras dan setelah adanya Kebijakan HET beras.

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata harga jual beras medium oleh pedagang eceran mengalami perbedaan, yaitu terdapat peningkatan harga jual beras medium sebesar Rp1.553,00. Akan tetapi perbedaan harga jual beras medium tersebut bukan disebabkan oleh Kebijakan HET, melainkan karena harga beli beras dari pedagang beras yang naik. Para pedagang beras menjual beras dengan harga yang fluktuatif berdasarkan harga yang berlaku di lapangan. Kebijakan HET tidak banyak berdampak terhadap pedagang eceran beras disebabkan kebanyakan dari pedagang eceran beras belum mengetahui adanya Kebijakan HET beras. Rata-rata harga beras medium sebelum Kebijakan HET beras medium dan setelah Kebijakan HET beras medium dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata harga beras medium antara sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET beras

No	Sebelum HET		Setelah HET	
	Bulan	Harga (Rp/Kg)	Bulan	Harga (Rp/Kg)
1	Maret 2017	9.433	September 2017	10.329
2	April 2017	9.489	Oktober 2017	10.665
3	Mei 2017	9.622	November 2017	11.147
4	Juni 2017	9.511	Desember 2017	11.494
5	Juli 2017	9.633	Januari 2018	11.601
6	Agustus 2017	9.667	Februari 2018	11.439
	Rata-rata	9.559	Rata-rata	11.112

Sumber: Data primer, 2018.

4. Dampak terhadap konsumen

Kebijakan HET beras yang belum efektif menyebabkan kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap konsumen. Untuk melihat perbedaan jumlah pembelian beras antara sebelum Kebijakan HET beras dan setelah ditetapkannya Kebijakan HET beras dapat dilihat dari jumlah pembelian beras sebelum dan setelah Kebijakan HET beras. Hasil dari uji *paired sample t-test* menggunakan SPSS sehingga didapatkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,006. Nilai sig.(2-tailed) tersebut lebih kecil daripada Alpha (0,1) sehingga Ho ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelian beras sebelum adanya Kebijakan HET beras dan pembelian beras setelah adanya Kebijakan HET beras.

Pembelian beras antara sebelum dan setelah Kebijakan HET yaitu terjadi penurunan pembelian beras sebesar 0,207 kg/kapita/bulan. Akan tetapi penurunan pembelian beras tersebut bukan disebabkan oleh Kebijakan HET beras, melainkan karena terjadinya peningkatan harga beras eceran di pasar-pasar tradisional di Provinsi Lampung. Meskipun terjadi perbedaan pembelian jumlah beras, jumlah pembelian beras tersebut tidak besar dikarenakan beras merupakan kebutuhan pangan pokok konsumen. Untuk melihat koefisien yang menjelaskan perubahan jumlah beras medium yang diminta konsumen sebagai akibat dari terjadinya perubahan harga beras medium maka digunakan indikator elastisitas harga permintaan. Rata-rata pembelian beras medium oleh konsumen beras di Provinsi Lampung pada bulan Juni 2017 hingga bulan November 2017 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rata-rata pembelian beras medium oleh konsumen di Provinsi Lampung pada kurun waktu bulan Juli hingga November 2017

No	Sebelum HET		Setelah HET	
	Bulan	Pembelian Beras (Kg/Kapita)	Bulan	Pembelian Beras (Kg/Kapita)
1	Juni 2017	4,90	Sept 2017	4,74
2	Juli 2017	4,70	Okt 2017	4,35
3	Agsts 2017	4,73	Nov 2017	4,62
	Rata-Rata	4,78	Rata-Rata	4,57

Sumber: Data primer, 2018.

Jumlah permintaan beras sebelum Kebijakan HET dilihat dari rata-rata jumlah pembelian beras pada Juni - Agustus 2017 (4,778 kg) dan rata-rata jumlah permintaan beras setelah Kebijakan HET dilihat pada bulan September - November 2017 (4,572 kg). Harga barang sebelum Kebijakan HET juga dilihat dari rata-rata harga beras medium pada bulan Juni - Agustus 2017 (Rp9.604,00) dan harga beras setelah Kebijakan HET pada September - Oktober 2017 (Rp11.522,00). Elastisitas harga permintaan beras medium di Provinsi Lampung yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas} &= \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} : \frac{P_2 - P_1}{P_1} \\ &= \frac{4,572 - 4,778}{4,778} : \frac{11.522 - 9.604}{9.604} \\ &= -,2158 \end{aligned}$$

Menurut hasil perhitungan diatas, berarti apabila harga naik 1% (Rp960,00) akan mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan atau jumlah barang yang diminta sebesar 0,2158% (0,1 kg) dan sebaliknya. Karena elastisitas permintaan beras medium kurang dari 1, maka elastisitas harga permintaan dinyatakan inelastis. Elastisitas harga permintaan beras yang inelastis menunjukkan bahwa beras merupakan kebutuhan pangan pokok.

**Rantai pasok beras medium**

Rantai pasok beras medium dalam penelitian ini mencakup aliran harga, aliran produk, serta aliran informasi beras medium, terutama pada Provinsi Lampung. Untuk dapat melihat perbedaan rantai pasok beras sebelum dan setelah Kebijakan HET, diperlukan data sekunder aliran tataniaga beras yang mendukung. Menurut (Fitriani *et al.*, 2011), aliran tataniaga beras di Provinsi Lampung berdasarkan penelitian terbentuk 4 aliran. Sebagai pembanding, dilakukan penelitian rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung. Berikut rantai pasok beras medium setelah Kebijakan HET beras:

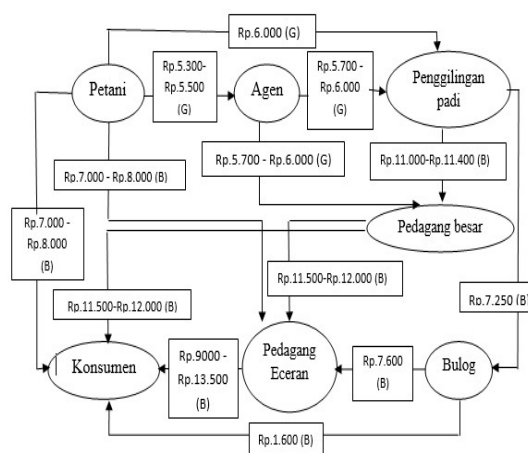
**1. Aliran Harga**

Aliran harga akan menggambarkan proses pembentukan harga dari harga atau finansial dalam proses jual beli beras, serta akan menunjukkan pihak mana saja yang berpengaruh dalam proses pembentukan harga beras medium. Petani menjual gabah kepada berbagai pihak. Cara pembayarannya yaitu secara tunai dan ditentukan melalui harga yang sedang berlaku dan

tawar-menawar. Pihak selanjutnya yaitu agen. Harga jual agen menyalurkan gabah ke penggilingan padi Rp5.700,00/kg - Rp6.000,00/kg.

Penggilingan padi menjual beras kepada beberapa pihak, yaitu pedagang besar, pedagang eceran, dan bulog. Penggilingan padi menyalurkan beras medium ke pedagang besar dan bulog dengan harga jual Rp7.250,00/kg - Rp11.400,00/kg. Cara pembayarannya yaitu secara tunai. Kemudian di tingkat pedagang besar cara penentuan harganya dengan melihat harga yang berlaku di pasaran dan cara pembayaran secara tunai. Pembeli beras di tingkat pedagang besar ini yaitu pedagang eceran dan juga konsumen dengan harga jual Rp11.500,00/kg hingga Rp12.000,00/kg.

Pada tingkat bulog, sebelumnya bulog menjual langsung beras ke konsumen sebanyak 15kg/ kepala dengan harga Rp1.600,00/kg yang dinamakan RASKIN (Beras Miskin). Pada Januari 2018 RASKIN digantikan dengan BANSOS (Bantuan Sosial) dengan membagikan beras kemasyarakatan miskin 10 Kg/ Kepala. Bulog juga menjual beras kepada pedagang eceran dengan harga jual Rp7.600,00/kg beras. Selanjutnya di pedagang eceran menjual beras dengan rata-rata harga jual beras Rp11.439,00/kg. Skema aliran harga beras medium di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.



Keterangan : - B = Beras  
- G = Gabah

Gambar 2. Skema dari aliran harga beras medium di Provinsi Lampung.

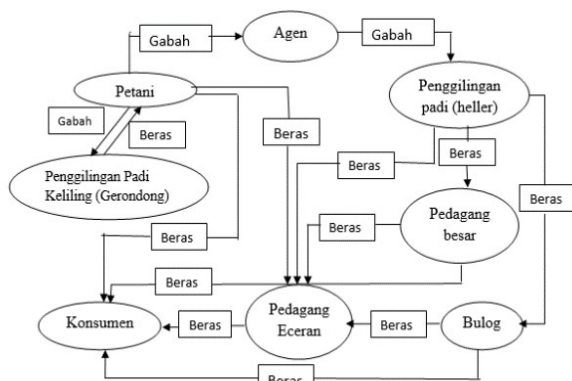
Sumber : Data primer, 2018

## 2. Aliran Produk

Aliran produk yaitu suatu aliran atau saluran yang menggambarkan proses suatu produk yaitu beras medium dari petani hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Berdasarkan Gambar 3, rantai pasok pada aliran produk beras medium tersebut terbagi menjadi enam saluran yaitu sebagai berikut:

1. Petani → gerondong → Petani → konsumen
2. Petani → gerondong → Petani → pedagang eceran → konsumen
3. Petani → agen → penggilingan padi → pedagang besar → pedagang eceran → konsumen
4. Petani → agen → penggilingan padi → pedagang eceran → konsumen
5. Petani → agen → penggilingan padi → bulog → pedagang eceran → konsumen
6. Petani → agen → penggilingan padi → bulog → konsumen

Aliran produk beras medium di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Skema aliran produk beras medium.  
Sumber: Data primer, 2018

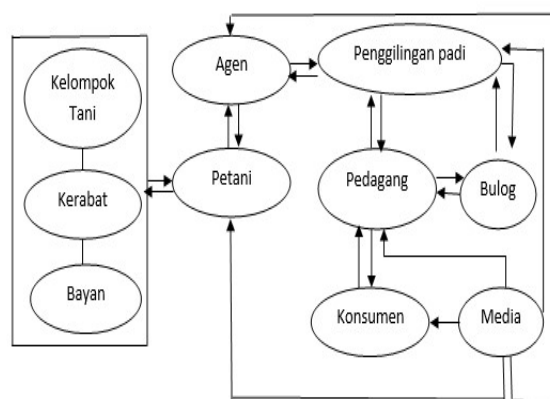
## 3. Aliran Informasi

Aliran informasi merupakan aliran yang menggambarkan informasi dalam rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung didapatkan oleh setiap pelaku usaha beras dari petani hingga konsumen akhir. Informasi mengenai harga gabah yaitu pada penggilingan padi. Penggilingan padi mengetahui dari harga beras di pasaran. Harga pasaran tersebut didapat dari saling bersaingnya harga beras antar sesama penggilingan padi atau yang disebut tempur harga. Aliran informasi dari bulog mengikuti aturan dan kebijaksanaan dari pemerintah. Untuk harga beli beras bulog mengacu pada INPRES No 5 Tahun 2015. Secara keseluruhan aliran informasi beras medium di

Provinsi Lampung berjalan dua arah kecuali informasi dari media ke petani, konsumen, pedagang eceran, dan penggilingan padi.

Perbedaan aliran rantai pasok beras penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu terdapat pada jumlah saluran yang terbentuk.

Pada penelitian sebelumnya aliran rantai pasok di Provinsi Lampung dibagi menjadi 4 aliran sedangkan dalam penelitian saat ini dibagi menjadi 6 aliran. Empat aliran produk sebelum adanya Kebijakan HET beras relatif sama dengan setelah adanya Kebijakan HET beras. Dua aliran produk yang berbeda dengan sebelum adanya Kebijakan HET beras yaitu adanya gerondong (penggilingan padi keliling) yang membantu petani dalam mengalirkan beras hingga ke konsumen. Aliran informasi beras medium di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Skema dari aliran informasi beras medium di Provinsi Lampung.  
Sumber: Data primer, 2018

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yaitu Kebijakan HET beras medium belum efektif dilaksanakan di Provinsi Lampung pada bulan September 2017 hingga Februari 2018 dengan rata-rata harga beras medium di Provinsi Lampung sebesar Rp11.113,00/kg (di atas HET yang telah ditentukan). Kebijakan HET beras tidak berdampak terhadap petani, penyalur, pedagang eceran, dan konsumen. Rantai pasok beras medium sebelum dan setelah adanya Kebijakan HET beras hanya terjadi perubahan pada aliran harga yaitu pada saat bulog mengalirkan beras ke konsumen. Perbedaan aliran rantai pasok beras penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu terdapat pada jumlah saluran yang terbentuk.

Pada penelitian sebelumnya aliran produk rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung dibagi menjadi empat saluran pemasaran sedangkan dalam penelitian saat ini rantai pasok dibagi menjadi enam saluran pemasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldhariana SF, Lestari DAH, dan Ismono H. 2016. Keragaan Agroindustri Beras Siger di Kota Metro. *JIIA*. 4(3):317–325. <http://jurnal.fp.ac.id/index.php/JIA/article/view/1507/3919>. [3 Agustus 2018].
- Agung AR, Wijiharjono N, dan Setyowati T. 2013. *Ekonomi Mikro edisi 2*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Anatan L. 2000. *Supply Chain Management*. Alfabeta. Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Rata-Rata Konsumsi per Kapita Per Minggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Urusan Logistik (BULOG). 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang penting. <https://atrbpn.go.id/peraturan/presiden>. [17 Januari 2018].
- Destiani D, Ismono H, dan Adawiyah R. 2013. Permintaan mangga indramayu oleh konsumen di pasar tradisional pada wilayah Kota di Provinsi Lampung. *JIIA*. 3(4):377-384. <http://jurnal.fp.ac.id/index.php/JIA/article/view/1810/2825>. [3 Agustus 2018].
- Fitriani, Ismono H, dan Rosanti N. 2011. Produksi dan Tataniaga Beras di Provinsi Lampung. *JIIA*. 5(1):1-11. <http://jurnal.fp.ac.id/index.php/JIA/article/view/376/706>. [15 Agustus 2018].
- Miles MB, dan Huberman M. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP. Jakarta
- Priyatno D. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Sucahyowati H. 2017. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Wilis. Malang